

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 telah dapat diselesaikan.

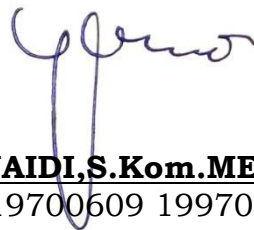
Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan komunikasi dan informatika pada tahun 2020 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Program/kegiatan-kegiatan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan selama tahun 2020 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya komunikasi dan informatika secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman Renstra, Program dan Kegiatan pada periode 2016-2021 kedepan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom.ME
NIP. 19700609 199703 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- 2.4 Kebijakan Strategis
- 2.5 Penghargaan

BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ BUPATI PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya
- 4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology).

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah

dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 86 tahun 2017, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 89 tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambaran Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Lkj Dinas Komunikasi dan Informatika 2020 dibuat

sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2019, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 bahwa: “Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Komunikasi dan Informatika”.

2. Fungsi

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informasi;
5. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Komunikasi dan Informasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 89 tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Pesisir Selatan sesuai struktur organisasi dan tata kerja terdiri dari 1 unit eselon II, 3 unit eselon III yang terdiri dari 1 sekretariat dan 2 Kepala Bidang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

3. Bidang Penyelenggaraan E Government, terdiri dari:

- a. Seksi Persandian
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi
 - c. Seksi Pelayanan E Government
4. Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi, terdiri dari:
- a. Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Seksi Desiminasi Infromasi dan Pemberdayaan Telematika
 - c. Seksi Statistik

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris

1. Membantu Kepala Dinas mengkordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretarismembawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Membantu Sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, mengolah dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi Membantu Sekretaris merencanakan, menyusun, mengolah rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang – bidang yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan E Government

Bidang Penyelenggaraan E Government mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Penyelenggaraan e- Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a) Seksi Pelayanan E Government

Seksi Pelayanan E Government mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi e-government

b) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Pengembangan dan Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengembangan infrastruktur dan teknologi.

c) Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah terkait dengan persandian.

2. Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi :

Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang statistik, persandian dan pelayanan informasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

a) Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengumpulkan data urusan statistik sektoral.

b) Seksi Desiminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika

Seksi Desiminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaksanakan dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kegiatan diseminasi informasi dan pemberdayaan telematika

c) SeksiPengelolaan, Pelayanan Informasi Dan KomunikasiPublik

Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi Dan KomunikasiPublik mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengawasi urusan pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan, pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2020. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah yang mengurus urusan Komunikasi dan Informatika yang dicapai di tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama Dinas	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,00	3,34	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bernilai sebesar 3,34. Angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian SPBE yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dimana Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan peringkat Baik.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2020. Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang dicapai di tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Indikator yang terpenuhi	Nilai	3,00	3,34	Capaian Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik tercatat nilainya sebesar 3,34. Angka tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator yang diminta oleh Pemerintah Pusat dalam penilaian SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) Kabupaten Pesisir Selatan ternilai dengan baik
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	(97-100)	99	Capaian Nilai Keterbukaan Informasi

		Publik				Publik Bagi Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencapai “Informatif”
--	--	--------	--	--	--	--

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase peningkatan pelayanan dan Pengembangan Komunikasi melalui media masa	Persen	100	100	3.418.250,-	3.418.250,-,-	Kurangnya Pemahaman ASN tentang Perda SPBE	Melaksanakan Sosialisasi bagi ASN tentang Perda SPBE	-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
				Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;									
	1			Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi	Kali	1	1	3.418.250,-	3.418.250,-	Kurangnya pengetahuan tentang Perda SPBE	Melaksanakan Sosialisasi tentang Perda SPBE	
2				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Peningkatan SDM Teknologi Informasi Komunikasi	Persentase	100	0	0	0	Kurangnya pengetahuan tentang Teknologi Informatika dan Komunikasi	Melaksanakan pelatihan tentang TIK	
	2			Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM di bidang TIK	orang	90	0	0,-	0,-	Kurangnya pengetahuan tentang Teknologi Informatika dan Komunikasi	Melaksanakan pelatihan tentang TIK bagi ASN	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
				Informasi							agi ASN		
3				Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase publikasi dan informasi	Persentase	100	98	150.137.000,-	147.275.000,-	Belum terpublikasi pembangunan daerah secara maksimal	Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian publikasi dan informasi pembangunan Daerah	
	3			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase tersebarnya informasi pembangunan daerah	Persentase	100	98	150.137.000,-	147.275.000,-	Belum terpublikasi pembangunan daerah secara maksimal	Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian publikasi dan informasi pembangunan Daerah	
4				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi	Persentase	100	98					
	4			Kegiatan Pelayanan informasi Publik dalam	Persentase	Persentase	100	100	148.577.500,-	148.231.525,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
				Rangka Keterbukaan Informasi Publik									
5				Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Persentase penyampaian informasi melalui media radio dan mupen	Persentase	100	95	261.437.500,-	249.231.035,-	Banyak OPD yang belum mempergunakan sarana yang tersedia untuk penyampaian program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD	Kembali menyurati dan mengingatkan OPD untuk mempergunakan sarana (radio) pemerintah dalam penyampaian program pembangunan daerah	
6				Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Medittra dan Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina (data)	data	1	1	13.700.000,-	13.647.500,-	Konsider Pandemi Covid19 membuat pelaksanaan pendataan terkendala saat ke lapangan	Melaksanakan pendataan dan pembinaan secara virtual	
7				Kegiatan Pengelolaan	Persentase terlaksananya penyampaian	Persentase	100	77	36.445.000,-	28.191.560,-	Tidak semua OPD melaksanakan	Menyurati dan memberitah	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
				Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Wabah Virus Covid19	informasi tentang Covid19 melalui Video Convergence						n Video Convergence dalam pelaksanaan tugasnya	ukan OPD untuk mempergunakan Video Convergence dalam rangka pencapaian target kinerja OPD walaupun masih dalam situasi Pandemi	
4				Program Pengelolaa n Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	Persentase	100	99	2.683.290.198,-	2.648.202.044,-			
	8			Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity	Persentase penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama smartcity	Persentase	100	99	2.683.290.198,-	2.648.202.044,-	-	-	
5	Persandian			Program Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi	Persentase	100	96	16.065.000,-	15.347.700,-			
	9			Kegiatan Pengamanan	Persentase Pengamanan	Persen	100	96	16.065.000,-	15.347.700,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
				an Informasi dan Sistem Elektronik	Informasi dan Sistem Elektronik	tase							
6				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase	100	98	40.167.500,-	39.168.900,-			
	10	Statistik		Kegiatan Penyediaan Data Statistik	Jumlah Buku Pesisir Selatan Dalam Angka	Jumlah	200	200	40.167.500,-	39.168.900,-			
7	11	Persandian		Program Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	Persentase Pola Hubungan	Persentase	100	100	1.519.000,-	1.519.000,-			
				Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan komunikasi Pemerintah	Persentase				1.519.000,-	1.519.000,-			

2.4 Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Terwujudnya e government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (e government).

2.5 Penghargaan

Tabel 2.5

Penghargaan yang Diraih Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Penghargaan Terbaik I dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk Kategori Kabupaten/Kota terinformatif	Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama	Padang, 25 November 2020	 

					
2.	Sekretaris Daerah Erizon, MT. selaku Pengarah PPID Kab. Pesisir Selatan mendapatkan Achievement Motivation Person Award 2020	Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama	Padang, 25 November 2020	

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2019

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB V

PENUTUP

Data yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai kondisi yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika senantiasa dapat lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.